

STUDI TINGKAT KERUSAKAN HUTAN LINDUNG MBAY AKIBAT PENCURIAN POHON

Karolus Boromeus Pega¹⁾

¹⁾ Fakultas Kehutanan Insitut Pertanian Malang

Agus Sukarno²⁾

²⁾ Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Malang

Sri Sulastr³⁾

³⁾ Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Malang

ABSTRAK

Kawasan hutan lindung Mbay oleh masyarakat sekitar hutan dijadikan sarana pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak memperhatikan aspek kelestarian sehingga menyebabkan sebagian besar kawasan hutan tersebut menjadi rusak. Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat kerusakan hutan lindung Mbay dan kerugian ekonomi khusus kayu akibat pencurian pohon. Penelitian dilakukan menggunakan metode survei melalui observasi langsung di lapangan. Data primer diperoleh dengan jalan pengamatan langsung di lapangan serta wawancara secara acak dengan masyarakat sekitar berjumlah 20 orang dan petugas Dinas Kehutanan 5 orang. Sedangkan data sekunder meliputi letak luas kawasan, topografi dan iklim diambil dari instansi terkait. Hasil penelitian diperoleh data untuk perhitungan jumlah tonggak sebanyak 636 Pohon, yang hidup 382 pohon. Hasil analisis tingkat kerusakan hutan lindung Mbay 60.06 % sehingga dikategorikan kerusakan sangat parah karena nilainya berkisar $> 50\% - 80\%$ (Boer, 1987). Pencurian pohon oleh masyarakat sekitar kawasan hutan yang terus menerus akan menyebabkan berkurangnya potensi tegakan yang ada sehingga lambat laun akan menimbulkan kerusakan yang sangat parah. Kerugian ekonomi (Kayu) yang di timbulkan akibat pencurian pohon di Hutan Lindung Mbay terdapat 80.90 M³ kayu yang ditebang yang ditaksir Negara (Dinas Kehutanan Nagekeo) mengalami kerugian sebesar Rp. 202.250.000 (Dua Ratus Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Kata kunci: Tingkat kerusakan, hutan lindung, pencurian kayu

STUDY OF FOREST DAMAGE CAUSED BY THEFT PROTECTED MBAY TREE

ABSTRACT

Mbay Protected forest area by forest communities used as a means of subsistence that do not pay attention to aspects of sustainability, causing most of the forest area to be damaged. The study aims to determine the level of damage Mbay protected forests and special economic losses due to theft of timber trees. The study was conducted using a survey method through direct observation in the field. Primary data were obtained by direct observation in the field and random interviews with the local community of 20 people and the District Forestry Officer 5 people. While the secondary data includes spacious layout area, topography and climate are taken from the relevant agencies. The results were obtained data for the calculation of the amount of the milestone as 636 trees, which lived 382 trees. The results of the analysis of the level of damage to a protected forest Mbay 60.06% so categorized the damage is severe because the value ranges from $> 50\% - 80\%$ (Boer, 1987) .Pencurian trees by people around the forest area continuously will cause a reduction in the potential of existing trees that will eventually causing severe damage. Economic losses (Wood) is caused due to theft of trees in Forest Preserve Mbay 80.90 M³ are wood harvested is estimated the State (Department of Forestry Nagekeo) suffered a loss of Rp. 202 250 000 (Two Hundred Twenty Million Two Hundred and Fifty Thousand)

Keywords: Extent of damage, protected forests, timber theft

PENDAHULUAN

Sumberdaya alam di berbagai wilayah Indonesia disadari suatu ketika akan habis seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi. Tekanan terhadap sumberdaya alam akan semakin besar, seiring dengan kepentingan dan kebutuhan yang semakin meningkat terhadap sumberdaya alam.

Hutan yang terletak di kawasan lindung berperan dalam menjaga dan mempertahankan keseimbangan ekologis, keberadaannya sangat bermanfaat bagi kehidupan yang ada di bawah kawasannya. Ketersediaan air yang cukup bagi berbagai macam kebutuhan, kelestarian hasil tanaman produksi melalui kesuburan tanah yang terjaga, dan keamanan fungsi lindung bagi ekosistem disekitarnya merupakan nilai yang ditawarkan dari keberadaan hutan lindung. Kerusakan hutan pada umumnya diakibatkan oleh pencurian pohon dan pembukaan lahan untuk perkebunan, maupun pertambangan. Hal ini tentu saja akan menimbulkan fenomena baru bagi kawasan yang selama ini menggantungkan pada keberadaan hutan.

Kawasan Hutan Lindung Mbay yang berlokasi di Kabupaten Nagekeo juga telah terjadi pengambilan kayu secara ilegal oleh masyarakat sekitar. Kondisi topografi kawasan lindung didominasi oleh pegunungan dan perbukitan. Keberadaan Kawasan Hutan Lindung Mbay yang lokasinya berbatasan langsung dengan pemukiman penghasilan rendah merupakan potensi awal munculnya permasalahan tersebut.

Kawasan hutan lindung Mbay dijadikan sarana pemenuhan kebutuhan hidup segelintir orang tetapi tidak memerhatikan aspek kelestariannya yang menyebabkan sebagian besar kawasan hutan tersebut akan menjadi rusak. Pencurian pohon pada umumnya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, yang menyebabkan rusaknya hutan.

Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat kerusakan hutan lindung Mbay.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui survei langsung dilapangan mengenai kerusakan hutan lindung. Keanekaragaman jenis vegetasi Hutan Lindung Mbay menggunakan luas lokasi penelitian 50 Ha, maka sampel yang diambil sebanyak 20 petak ukur dengan menggunakan metode purposive sampling dimana sampel ditentukan sendiri oleh peneliti berdasarkan kondisi kawasan Hutan Lindung Mbay. (Ruskanda, 1997).

Untuk mengetahui tingkat kerusakan maka penempatan PU secara purposive sampling. Penempatan PU sesuai dengan tujuan yang ingin diteliti (Ruskanda, 1997), kemudian mendata dan

menghitung jumlah yang ditebang berupa sisa-sisa tonggak yang ada di lapangan dengan cara mengukur diameter tonggak tiap pohon.

Pengamatan survei lokasi 1) Untuk mengetahui kondisi umum lokasi dan untuk menentukan lokasi petak ukur. 2) Melakukan wawancara terhadap masyarakat sekitar berjumlah 20 orang dan petugas Dinas Kehutanan lima orang. 3) Membuat petak ukur

Penempatan petak ukur menggunakan metode transek dengan luas petak ukur 20 x 50m untuk tingkat pohon, luas petak ukur 20 x 50m untuk tingkat pohon, secara **purposive sampling** dimana sampel ditentukan sendiri oleh peneliti berdasarkan kondisi kawasan Hutan Lindung Mbay.

$$\% \text{ Rusak} = \frac{\sum \text{pohon rusak tiap plot} \times 100 \%}{\text{Total pohon dalam plot}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Vegetasi *Komposisi Jenis Pohon*

Berdasarkan hasil analisis vegetasi dengan metode transek dalam 20 petak ukur dalam satu petak contoh dengan ukuran 20 x 50 m dapat ditemukan ±12–26 pohon. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa *Tubertanamontana* sp mempunyai Kerapatan Relatif tertinggi (6,95 %), hal ini menunjukkan bahwa di areal Hutan Lindung Mbay *Tubertanamontana* sp mempunyai jumlah vegetasi tertinggi dibandingkan dengan jenis vegetasi yang lain. Hal ini disebabkan oleh faktor iklim, dimana pada lokasi penelitian beriklim kering sehingga *Tubertanamontana* sp yang merupakan tumbuhan yang tahan panas dan kering dapat hidup dan beradaptasi dengan ekosistemnya.

Soegianto (1994) menyebutkan bahwa Frekwensi Relatif digunakan untuk mengetahui proporsi antara jumlah petak contoh yang berisi suatu jenis tertentu dengan total jumlah petak contoh. Frekwensi Relatif adalah frekwensi suatu jenis dibagi dengan frekwensi semua jenis dalam komunitas.

Tabernamontana sp mempunyai nilai Frekwensi Relatif tertinggi, yaitu 4,98 %, hal ini menunjukkan bahwa *Tabernamontana* sp (Pa) mempunyai penyebaran yang merata pada areal penelitian. *Tabernamontana* sp mempunyai kemampuan tumbuh dan adaptasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan jenis yang lainnya, jenis ini juga dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Disamping itu juga jenis ini juga termasuk jenis vegetasi yang tahan terhadap naungan dengan perakaran yang dalam dan dapat menembus batuan sehingga mampu menyerap unsur hara dan air lebih banyak dari jenis lainnya (Anonymous, 1988).

Dominasi Relatif (DR), Suatu jenis yang menentukan atau yang mengendalikan jenis lain

disebut jenis dominant atau dapat pula disebut jenis yang merajai (Reosoedarmo, 1984).

Dominasi merupakan perbandingan antara luas bidang dasar dengan luas contoh., sedangkan Dominasi Relatif merupakan dominasi suatu jenis dari dominasi seluruh jenis. *Tabertananmontana* sp merupakan jenis yang mempunyai nilai Dominasi Relatif tertinggi (8,87 %) disusul oleh *Sandericus kaetjapi*, *Debregeasia* sp, *Mangifera indica*, hal tersebut menunjukkan bahwa jenis *Tabernamontana* sp merupakan jenis vegetasi yang mendominasi di Hutan Lindung Mbay dan mencirikan komunitasnya. Jenis *Tabernamontana* sp mampu mendominasi di Hutan Lindung Mbay disebabkan karena keadaan iklim yang cocok untuk pertumbuhan jenis ini, kondisi tanah yang berbatu dan kekurangan air, ketinggian tempat dari permukaan laut dan topografi yang cukup miring.

Indeks Nilai Penting (INP), *Tabertananmontana* sp mempunyai Indeks Nilai Penting tertinggi (20,8) disusul oleh *Sandericus kaetjapi*, *Debregeasia* sp, *Mangifera indica*. Sehingga pada tingkat pohon jenis *Tabertananmontana* sp merupakan jenis vegetasi yang mencirikan Hutan Lindung Mbay.

Keanekaragaman Jenis Pohon Soegianto (1994), menyebutkan bahwa keanekaragaman jenis yang tinggi menunjukkan suatu komunitas memiliki suatu kompleksitas tinggi, karena dalam komunitas itu terjadi interaksi spesies yang tinggi pula. Dalam suatu komunitas yang mempunyai keanekaragaman yang tinggi akan terjadi interaksi spesies yang melibatkan transfer energi (jaringan makanan, predaksi, kompotisi, dan pembagian relung yang teoritis lebih kompleks).

Hasil perhitungan indeks

Keanekaragaman jenis yang dilakukan dengan indeks keanekaragaman Simpson di hutan lindung Mbay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo Diketahui bahwa untuk tingkat pohon mempunyai indeks keaneka-ragaman 0.97 %. Hal ini menunjukkan bahwa hutan alam tersebut jenis keanekaragamannya rendah. Keaneka-ragaman jenis vegetasi di hutan Mbay disebabkan oleh keadaan topografi yang bervariasi dengan tingkat kemiringan landai. Pada kemiringan ini hanya jenis-jenis tertentu saja yang hidup dan jenis tersebut berbeda dengan jenis yang biasa hidup di daerah kurang landai. Disamping itu iklim seperti suhu, curah hujan, kelembapan dan tekanan uap air terutama suatu iklim mikro dari suatu tempat yang dipengaruhi oleh keadaan topografi, terutama perbedaan letak tinggi yang juga berpengaruh terhadap penyebaran vegetasi.

Tingkat Kerusakan Hutan Lindung, kerusakan hutan Lindung Mbay adalah kerusakan atau kematian pohon sebagai akibat dari pencurian

kayu. Penyebab dan pelakunya adalah masyarakat di sekitar kawasan hutan. Analisis tiap - tiap petak contoh dengan cara mengamati dan menghitung jumlah sisa tonggak kayu dari pencurian dibagi dengan jumlah pohon total dalam satu petak contoh dikali seratus persen

Data untuk perhitungan jumlah tonggak sebanyak 636 pohon, yang hidup 382 pohon. Berdasarkan hasil analisis persentase kerusakan maka besar tingkat kerusakan hutan lindung Mbay 60.06 % sehingga dikategorikan kerusakan sangat parah karena nilainya berkisar > 50% - 80% (Boer, 1987).

Kegiatan pencurian pohon oleh masyarakat sekitar kawasan hutan yang terus menerus akan menyebabkan berkurangnya potensi tegakan yang ada dalam kawasan hutan lindung dan lambat laun akan menimbulkan kerusakan yang sangat parah. Dari hasil wawancara petugas dilapangan menunjukkan bahwa kerusakan yang terjadi diakibatkan rendahnya tingkat pendidikan, sosial ekonomi, dalam arti pendapatan masyarakat masih rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan, jumlah penduduk yang semakin bertambah serta kelemahan sistim pengawasan dari aparaturnya fungsional yang ada di Kecamatan Aesesa.

Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pencurian pohon yang terus menerus adalah: Terganggunya fungsi hidrologis yaitu lahan bekas tebangan yang kosong tidak mampu menyerap dan menyimpan air yang akan mengakibatkan terjadinya erosi dan banjir. Terdegradasinya kualitas tanah, kekeringan yang berkepanjangan, serta kemiskinan karena potensi yang terus menyusut. Tegakan yang rapat menjadi jarang dan menjadi hamparan yang kosong dan kritis.

Apabila tingkat kerusakan tidak diantisipasi sejak dini maka dikhawatirkan keadaan lingkungan terutama kawasan disekitar hutan akan terdegradasi. Pencurian pohon oleh masyarakat sekitar kawasan secara terus-menerus akan dapat meningkatkan kerusakan hutan dan mengurangi potensi hutan. Akibat dari terjadinya eksploitasi hutan dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar kawasan pada khususnya dan masyarakat lain pada umumnya.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang menyebabkan kerusakan hutan akibat pencurian oleh masyarakat sekitar kawasan hutan perlu dilakukan upaya-upaya kerjasama pihak terkait dengan masyarakat disekitar kawasan hutan disesuaikan dengan latarbelakang daerah setempat. Pencegahan dan pemberantasan kegiatan pencurian liar dapat ditekan dengan langkah - langkah sebagai berikut:

Memperbaiki Taraf Hidup Masyarakat, melibatkan masyarakat secara langsung didalam pengelolaan hutan serta dengan memberikan lahan

garapan untuk masyarakat. Menurut Anonymous (2001), bahwa masalah sosial-ekonomi menyebabkan kerusakan hutan, konsep pembangunan hutan yang baru semestinya lebih banyak melibatkan masyarakat setempat. Kegiatan yang bersifat merusak tersebut perlu diarahkan menjadi kekuatan yang bersifat membangun. Kehutanan dan masyarakat benar-benar menjadi mitra sejajar yang dapat bekerja sama dalam suatu sistem pengelolaan hutan sehingga antara keduanya terjalin interaksi yang menguntungkan. Dengan demikian pengelolaan hutan hendaknya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sekitar kawawan dan menjaga peranan hutan sebagai perlindungan hidup.

Penyuluhan dan Pendidikan Petugas, kehutanan yang melakukan penyuluhan dan pendidikan terutama bagi masyarakat disekitar kawasan hutan, dituntut kesabaran yang tinggi dalam memberikan penyuluhan mengingat tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah, disini masyarakat perlu waktu untuk mengerti, memahami, dan menyadari akan pentingnya keberadaan hutan.

Usaha pencegahan pencurian pohon akan berhasil apabila didukung oleh semua pihak, antara petugas keamanan hutan, masyarakat sekitar kawasan hutan dan perangkat desa merupakan suatu unit yang terlibat langsung di lapangan dan terlibat langsung dalam kegiatan hutan dan kehutanan, ketiga pihak ini saling terkait dan bila antara ketiga pihak terjadi saling pengertian akan pentingnya hutan maka tindakan pengerusakan hutan terutama pencurian liar akan dapat ditanggulangi.

Sutarman (1986) menjelaskan masalah penanggulangan kegiatan pencurian liar tidak terlepas dari masalah ekonomi, sosial, budaya dan segi moral agama. Beberapa hal yang harus diupayakan dalam pencegahan dan penanganan kegiatan pencurian liar adalah penyuluhan yang berkaitan dengan fungsi hutan dan kriminalitas serta perundangan, serta menumbuhkan sikap tanggung jawab terhadap keamanan dan kelestarian hutan.

Membina dan Membangun Lingkungan Masyarakat

Pencurian liar pada dasarnya dipengaruhi oleh hidup dan kehidupan masyarakat pedesaan. Kelestarian lingkungan hidup tidak terlepas dari campur tangan masyarakat sekitarnya, demikian pula dengan kelestarian hutan tidak terlepas dari kehidupan masyarakat yang berada di sekitar hutan. Dalam pemecahan kepadatan penduduk, pemerintah melakukan usaha-usaha penanggulangan dengan cara transmigrasi dan Keluarga Berencana yang bertujuan untuk

mengatur tingkat kepadatan penduduk, secara tidak langsung usaha ini turut mencegah pencurian liar.

Peraturan Perundang-undangan

Pengamanan dan pengawasan hutan tidak mungkin berhasil tanpa dukungan semua pihak terkait (stake holder), terutama peran aktif polisi khusus kehutanan dan aparat penegak hukum (POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan).

Sebagaimana telah diatur dalam undang-undang, bahwa didalam melaksanakan tugasnya polisi khusus kehutanan dan POLRI tidak terlepas dari unsur-unsur hak dasar manusia, karena pada dasarnya kegiatan pencurian liar disebabkan oleh perbuatan manusia.

Menurut Kartodihardjo (2004), bahwa peraturan perundang-undangan bertujuan untuk memperjelas, mempertegas pelaksanaan dan mempercepat penanganan tindakan pidana kehutanan yang harus didasarkan pada undang-undang kehutanan. Mempertegas maksudnya agar adanya persamaan persepsi tindakan diantara aparat penegak hukum dalam penanganan tindakan pidana bidang kehutanan. Mempercepat maksudnya penanganan tindak pidana kehutanan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang ada dan dipandang masih memerlukan waktu yang cukup lama sehingga penanganan barang bukti dan pelaku tindak pidana memerlukan biaya yang besar dan berakibat pada penurunan kualitas.

Usaha preventif yang dilakukan antara lain: menekan gangguan terhadap hutan sekecil mungkin, penyempurnaan undang-undang dan memperbaiki supremasi hukum. Sedangkan usaha represif antara lain: mengadakan perondaan dan pengawasan teratur dan kontinyu pada daerah daerah yang rawan, penyediaan pos-pos penjagaan, penindasan para pelaku tanpa pandang bulu, mengadakan pembinaan masyarakat dalam bentuk penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan untuk mencari pendapatan alternatif.

Hal ini didukung oleh Simon (2000), penduduk yang bertempat tinggal di sekitar hutan mempunyai hubungan erat dengan hutan, terutama dalam usaha memenuhi kebutuhan sehari-hari. Batasan kawasan hutan lebih diberi tanda-tanda yang lebih jelas dan permanen, polisi hutan dibentuk untuk menjaga keamanan, dan peraturan tentang sanksi bagi pelanggar.

Kerugian Ekonomi Setelah dilakukan pengamatan dan pengukuran di lapangan yang dibebani dengan cara menempatkan petak ukur sesuai purposive sampling

Berdasarkan hasil penelitian, kerugian ekonomi khususnya kayu yang ditimbulkan akibat pencurian pohon di Hutan Lindung Mbay yaitu dari 20 petak ukur terdapat 80.90 M³ kayu yang ditebang yang ditaksir Negara (Dinas Kehutanan

Nagekeo) mengalami kerugian sebesar :
Rp. 202.250.000 (Dua Ratus Dua Juta Dua Ratus
Lima Puluh Ribu Rupiah)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Besarnya kerusakan kawasan Hutan Lindung Mbay di Mbay Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo adalah 60.06 % untuk tingkat pohon maka dikategorikan sebagai tingkat kerusakan parah. 2) Kerugian secara Ekonomis sebesar Rp. 202.250.000,-

Saran

Perlu adanya kerjasama sinergis antara Pemerintah (Dinas Kehutanan) dengan masyarakat sekitar kawasan hutan seperti pembinaan dan penyuluhan tentang manfaat ekologis, sosial ekonomi dan akibat kerusakan hutan terhadap kehidupan manusia. 2). Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan oleh Pemerintah (Dinas Kehutanan) untuk mencari pendapatan alternatif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap hutan. 3) Meningkatkan upaya preventif dan represif bagi pengamanan Kawasan Hutan Mbay.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A. 1996. Hutan dan kehutanan Citra Press Malang.
P:2-3. 2001. Hutan dan Kehutanan. Kanisius.
Yogyakarta. P:54-55.
- Marsono, D., 1977. Deskripsi vegetasi dan tipe-tipe vegetasi tropika. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Manan, S, 1998. Hutan rimbawan dan masyarakat. Soerianegara dan Indrawan, 1983 Analisis vegetasi
- Simon, H, 1996. Metode Inventarisasi Hutan. Aditya Media, Yogyakarta.
- Soegianto, 1994. Keanekaragaman Jenis Vegetasi Undang RI. No 41/1999 tentang Kehutana

